

**PENGELOLAAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE JEMBATAN PELANGI DI
DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

Oleh : Fenty Utari

Fentyutari99@gmail.com

Pembimbing : Dadang Mashur

dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Rainbow Bridge Mangrove Forest Ecotourism is the only tourist destination in Banglas Village which is managed by BUMDES Banglas Bestari. Mangrove forests have the potential to be managed and developed because mangroves have aesthetic value, therefore cultivating and developing mangroves to be used as tourist destinations in the local area. This study aims to determine how the management of the Rainbow Bridge Mangrove Forest Ecotourism and the obstacles in managing this ecotourism. The theoretical concept used is the management concept of Iwan Nugroho. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the research found indicate that the management carried out by BUMDES Banglas Bestari has not run optimally where there is no planning document, in its implementation there are still several things that have not gone well such as lack of coordination, and control of ecotourism management is still less organized and structured. The inhibiting factors in the management of the rainbow bridge mangrove forest ecotourism are limited funding sources, accessibility and inadequate facilities and infrastructure and the imposition of restrictions on community activities (PPKM).

Keywords: *Management, Ecotourism, BUMDES*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya dalam peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang tentunya dibutuhkan kesediaan destinasi wisata, jika hanya memanfaatkan wisata yang telah disediakan oleh alam itu tidak cukup oleh karena itu perlu adanya pembangunan disektor wisata. Pembangunan di sektor wisata ini berupa aktivitas yang menggali semua potensi pariwisata baik yang berasal dari sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan manusia yang seluruhnya memerlukan penanganan secara tepat.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Pasal 6 mengenai Pembangunan kepariwisataan yang di lakukan berdasarkan asas sebagaimana di maksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang belum dikembangkan secara optimal; bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Salah satu ekowisata yang ada di Kabupaten

Kepulauan Meranti adalah ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem hutan di daerah sekitar pantai yang biasanya ditumbuhi pepohonan yang bertahan hidup terhadap satu lingkungan yang mengandung kadar garam tinggi. Ekosistem mangrove sering disebut sebagai hutan bakau. Kata mangrove berasal dari bahasa portugis yaitu *mangue* yang berarti tumbuhan, dan *grove* yang berasal dari bahas inggris yang berarti belukar.

Mangrove adalah istilah umum untuk komunitas tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir dan memiliki daya adaptasi khusus terhadap lingkungan. Mangrove memiliki banyak fungsi bagi lingkungan, salah satunya yaitu ekosistem mangrove dapat berperan sebagai penahan terhadap intrusi angin, ombak dan air laut. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan tempat berkembang biaknya segala jenis ikan, udang, kepiting, kerang, siput dan satwa lainnya. Mangrove juga merupakan habitat banyak hewan liar seperti burung, biawak, berang-berang dan monyet. Dalam kegiatan masyarakat yang memanfaatkan ekosistem mangrove untuk mencari kayu dan daya tarik wisata alam, kita dapat melihat pentingnya mangrove bagi masyarakat dan ekonomi, dan memperkuat sistem dengan memperhatikan prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan ekologi dengan melibatkan pemangku kepentingan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mangrove memiliki nilai estetika. Karena fungsi estetika tersebut, mangrove sering kali dikelola sebagai acuan pengelolaan tempat wisata alam. destinasi wisata ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Membudidayakan dan mengembangkan mangrove untuk dijadikan destinasi wisata merupakan salah satu langkah yang tepat.

Ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi merupakan sebuah tempat wisata yang terletak di Dusun II Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten

Kepulauan Meranti. Luas hutan mangrove di lingkungan ekowisata yaitu 2 hektar. Kawasan hutan mangrove ini dulunya sering terjadi penebangan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian masyarakat setempat berdiskusi dengan kepala desa untuk memanfaatkan hutan mangrove tersebut. Berkat antusias serta kegigihan masyarakat dan pihak yang membantu kawasan hutan mangrove tersebut menjadi satu satunya destinasi wisata yang ada di Desa Banglas dan menjadi *icon* Desa Banglas. Ekowisata hutan mangrove diresmikan pada 19 November 2019. Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

Tabel 1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gazebo	8
2.	Toilet	2
3.	Kantin	1
4.	Tempat Sampah	3
5.	<i>Speedboat</i>	2
6.	Sampan Dayung	3
7.	Bebek Dayung	3

Sumber: BUMDes Banglas Bestari, Desa Banglas (olahan peneliti 2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi memiliki sarana dan prasarana yaitu Gazebo dengan kondisi baik, toilet dengan kondisi baik, kantin dengan kondisi kurang baik, tempat sampah dengan kondisi baik dimana dipisah untuk sampah organik dan anorganik, *speedboat* dengan kondisi baik, sampan dayung dengan kondisi baik, dan bebek dayung dengan kondisi baik namun belum pernah beroperasi dikarenakan kolamnya yang terlalu kecil. Untuk menunjang pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan

Pelangi berkembang lebih baik diperlukan penambahan sarana dan prasarana seperti mushola, kantin, dan wahana antraksi lainnya.

Gambar 1.1 Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi



Sumber: Arsip BUMDes Banglas Bestari, Desa Banglas

Ekowisata hutan mangrove ini merupakan hasil musyawarah antara masyarakat, tokoh masyarakat serta RT/RW bersama pemerintah desa. Wisata mangrove sebagai wujud mempromosikan desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan harapan bukan hanya masyarakat kabupaten kepulauan meranti saja yang berkunjung, melainkan masyarakat dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti juga bisa berkunjung ke ekowisata ini.

Tujuan didirikan ekowisata wisata hutan mangrove yaitu sebagai destinasi karena di desa banglas tidak ada tempat untuk rekreasi melepaskan kejenuhan. Agar masyarakat mengetahui bahwa hutan mangrove ini sebagai hutan yang di lindungi dan di jaga serta di lestarikan. Dan untuk meningkatkan ekonomi pemerintah desa secara umumnya kita melihat bahwa potensi wisata sangat besar sebagai tempat refreasing. Meskipun masih relative baru, ekowisata mangrove tersebut setiap hari dikunjungi pengunjung bila di rata ratakan 100 orang per hari.

Tabel 1.2 Jumlah Pengunjung Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi

Bulan	Jumlah pengunjung	
	2020	2021
Januari	7.523 orang	150 orang
Februari	3.451 orang	142 orang
Maret	617 orang	128 orang
April	Tutup	Tutup
Mei	Tutup	Tutup
Juni	Tutup	Tutup
Juli	1.721 orang	134 orang
Agustus	2.149 orang	Tutup
September	230 orang	101 orang
Oktober	Tutup	Tutup
November	Tutup	124 orang
Desember	Tutup	122 orang

Sumber: BUMDes Banglas Bestari, Desa Banglas (olahan peneliti 2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung ditahun 2021 turun drastis. Hal tersebut dikarenakan pengunjung ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi yaitu rata-rata dari pengunjung lokal. Sebagian besar itu dari kecamatan tebing tinggi, dan sebagian kecil itu ada dari kecamatan lain kemudian ada juga dari luar Kabupaten. Kemudian ditambah lagi pada tahun 2021 kasus covid meningkat sehingga adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga diharuskan tutup sementara.

Kegiatan pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek pembangunan yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Pengaruh dari aspek sosial dari pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi yaitu berubahnya mata pencaharian di mana dengan adanya ekowisata ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan seperti menjadi penjaga tiket masuk,

penjaga parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi *speed boat*. Dengan adanya adanya ekowisata hutan mangrove telah munculnya aturan norma di lokasi agar tidak melakukan tindakan merusak tanaman bakau, tingkat kesadaran dan kepatuhan warga terhadap aturan norma tersebut dinilai cukup baik. Pengaruh dari aspek ekonomi yaitu pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Pengaruh dari aspek lingkungan yaitu hutan mangrove berfungsi sebagai penyangga perlindungan wilayah pesisir dan sebagai upaya pencegahan abrasi.

Adapun beberapa upaya pengelolaan dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banglas, salah satunya yakni dengan adanya Badan Usaha Millik Desa (BUMDES). Untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di desa banglas, mereka meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 7 yaitu “Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang di kelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan badan usaha milik desa di tetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Yang dalam hal ini pengelola ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dikelola oleh BUMDES Banglas Bestari. Dengan adanya pengelolaan oleh BUMDES Banglas Bestari terhadap Ekowisata Hutan Mangrove, maka akan terwujud Ekowisata Hutan Mangrove yang baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya Ekowisata.

Dengan melihat kompleksitas berbagai makna ekowisata dan potensi yang dimiliki suatu daerah, maka pengelolaan ekowisata hutan mangrove harus mampu secara langsung maupun tidak langsung menciptakan berbagai peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Penggalan potensi, nilai, dan kelestarian kawasan ekosistem mangrove menjadi prioritas utama. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan prinsip keadilan dan kemandirian, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang dan pengelolaan dan pengembangan ekowisata hutan mangrove untuk mendukung perlindungan lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan ekowisata mangrove jembatan pelangi di Desa

Banglas kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan ekowisata jembatan pelangi di Desa Banglas kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan ekowisata mangrove jembatan pelangi di Desa Banglas kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan ekowisata jembatan pelangi di Desa Banglas kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi BUMDes dan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi di Desa Banglas kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dan sebagai bahan rujukan yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik membahas permasalahan yang sama.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang administrasi publik, terutama untuk pengembangan teori-teori pengelolaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang administrasi publik, terutama untuk pengembangan teori-teori pengelolaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen yang memiliki arti yaitu pengaturan atau pengurusan menurut Suharsimi Arikunto dalam Muamar et al., (2018:121). Secara umum, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin serta mengendalikan kegiatan sumber daya manusia dan lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efisien dan efektif.

Konsep istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata “*managment*” yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mecapai sasaran. Sejalan dengan pengertian tersebut Menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2014:2) mengatakan “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*”. Artinya, Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan Menurut Marry Parker Follet dalam Handoko (2014:8) Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin di perlukan.

Menurut Siswanto (2005:21), manajemen adalah suatu kegiatan sistematis yang berurutan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan kawasan wisata yakni ditujukan untuk melindungi tata nilai asli saat area dikembangkan. Akomodasi, sumber daya manusia, produk dan layanan, kepemimpinan, produk dan pengemasan harus dikembangkan secara hati-hati, konsisten dengan nilai-nilai lokal, dan dengan partisipasi masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata ini akan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya secara langsung akan dirasakan oleh pemilik objek wisata. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya antara lain: 1) membuka kesempatan kerja dan perluasan lapangan pekerjaan, 2) menumbuhkan aktifitas ekonomi masyarakat, 3) meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat

Ekowisata

Dibandingkan dengan industri pariwisata pada umumnya, ekowisata memerlukan metode pengelolaan yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Fokus pengelolaan ekowisata adalah bagaimana menjaga dan melindungi sumber daya yang tidak tergantikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan (terutama) yang akan datang. Aspek ekonomi dan ekologi sumber daya rentan terhadap konflik kepentingan. Masih banyak manfaat bagi generasi mendatang yang belum diperhitungkan (*tangible*), seperti fungsi keanekaragaman hayati atau manfaat flora dan fauna tertentu bagi ilmu pengetahuan sumber daya hutan. Dalam pengelolaan ekowisata yang lalai, manfaat ini dapat dengan mudah dikorbankan karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan ekowisata sangat mementingkan proses pendidikan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Hasilnya diharapkan dapat membangun

kesadaran dan mengembangkan perilaku yang signifikan untuk meningkatkan investasi (*natural, social, and economic capital*) (Nugroho, 2015:120).

Sistem manajemen nasional sumber daya pariwisata dilandasi rasa tanggungjawab dan motivasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Sistem manajemen tersebut membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berkemampuan Iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai idiologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat. Sistem manajemen nasional pariwisata, termasuk ekowisata diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor pariwisata dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Nugroho (2015:221) mengemukakan bahwa pengelolaan ekowisata harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Menurut Wood dalam Nugroho (2015:16) mendefinisikan Ekowisata merupakan suatu bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang ditetapkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nugroho (2015:17) mendefinisikan Ekowisata merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, Sebagai suatu sektor atau usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai suatu sektor usaha, efektivitas operasional jasa ekowisata biasanya sangat efisien dan ramping. Perjalanan wisata terdiri dari kelompok-kelompok kecil berukuran kurang dari 25 orang. Hal ini akan mencegah dampak sosial dan lingkungan yang bersifat masif akibat kehadiran fisik pengunjung

Menurut Kiswantoro & Susanto (2020:251) mengemukakan bahwa dalam proses pelaksanaannya, pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa prinsip utama, yaitu prinsip lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi Sugiyono (2018). Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri berperan aktif dalam perencanaan, proses, dan pelaksanaan penelitian. Seperti halnya dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan informasi sendiri melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Selatpanjang, lebih tepatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Banglas Bestari Desa Banglas. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) karena BUMDES menjadi pengelola ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi di Desa Banglas, Tebing Kecamatan Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan berbagai keterangan dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Keterangan-keterangan serta informasi yang diperoleh dari informan

tersebut akan diolah yang nantinya akan menjadi berbagai data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut yang di anggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, ataupun dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Banglas
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
3. Kepala Unit Wisata Desa
4. Ketua POKDARWIS
5. Masyarakat dan Pengunjung

4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang membutuhkannya. Data primer yang diperoleh dari informan yaitu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi . Data primer ini berasal dari catatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada (Hasan, 2002:58). Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh seperti: jurnal, buku, penelitian terdahulu, media massa dan sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu dari observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu turun langsung ke lokasi untuk mengamati, kemudian wawancara dengan

informan untuk pengumpulan data serta dokumentasi yang terkait pada saat peneliti melakukan penelitian ke lapangan.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Teknik analisa yang di gunakan pada penelitian ini adalah Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017: 246-253)

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi. Kemudian juga dilanjutkan dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih dan merangkum data yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga data yang diperoleh dapat tersusun lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan reduksi data tentang Pengelolaan ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dianalisis menggunakan teori pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan ekowisata yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, tabel dan lain sebagainya. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi yang sudah dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Sajian data bersifat naratif sehingga memudahkan untuk memahami dan melanjutkan ke proses selanjutnya. Peneliti menyajikan data terkait yaitu tentang Pengelolaan ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data yang cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Setelah data benar-benar lengkap sesuai yang dibutuhkan, maka barulah di ambil kesimpulan akhir dan diverifikasi agar dapat dipertanggung-jawabkan dari data-data yang sudah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi oleh BUMDES Banglas Bestari memiliki pengaruh terhadap aspek pembangunan yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Pengaruh aspek sosial pengelolaan ekowisata hutan mangrove Jembatan Pelangi mengubah mata pencaharian dimana ekowisata ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan seperti menjadi penjaga tiket masuk, penjaga parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi *speed boat*.

Dengan adanya ekowisata hutan mangrove telah muncul norma di lokasi agar tidak melakukan tindakan perusakan

mangrove, tingkat kesadaran dan kepatuhan warga terhadap norma tersebut dinilai cukup baik. Pengaruh aspek ekonomi yaitu pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pengaruh dari aspek lingkungan adalah hutan mangrove berfungsi sebagai penyangga perlindungan wilayah pesisir dan sebagai upaya pencegahan abrasi. Dengan melihat kompleksitas berbagai makna ekowisata dan potensi suatu kawasan, maka pengelolaan ekowisata hutan mangrove harus mampu secara langsung maupun tidak langsung menciptakan berbagai peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Penggalan potensi, nilai, dan kelestarian kawasan ekosistem mangrove menjadi prioritas utama.

1.1 Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan merupakan suatu langkah awal dalam penyusunan rencana-rencana serta merumuskan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah di tentukan. Dalam melakukan aktifitas harus didasari dari perencanaan yang telah di buat agar berjalannya kegiatan tersebut. Tanpa perencanaan yang baik maka akan mengalami kesulitan serta hambatan.

Perencanaan merupakan salah satu elemen dasar dalam manajemen. Perencanaan adalah tahapan yang utama dari fungsi manajemen, terutama dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi di Desa Banglas. Perencanaan sangat diperlukan ketika menentukan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi. Perencanaan awal adanya ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi di Desa Banglas yaitu karena wilayah hutan mangrove ini dinilai berpotensi menjadi destinasi wisata, maka diberikan surat keputusan kepala desa menunjuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Banglas Bestari untuk mengelola segala bentuk

kegiatan pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi.

Perencanaan pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi dibentuk dari gagasan masyarakat penduduk desa banglas dikarenakan di desa banglas tidak ada destinasi wisata yang bisa di kunjungi serta sudah menjadi visi dan misi Kepala Desa Banglas, sebagai mana sesuai dengan perintah dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mana desa tidak hanya membangun fisik namun juga harus mengembangkan potensi yang ada. Hutan mangrove yang ada di Desa Banglas memiliki potensi sehingga dapat dikelola menjadi destinasi ekowisata serta sebagai bentuk melestarikan lingkungan.

Perencanaan yang baik dimulai dengan adanya tujuan yang jelas. Tujuan utama pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi menjadi destinasi wisata yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang harus dilindungi dan harus dijaga serta di lestarikan. Dengan adanya ekowisata ini juga dapat membantu meningkatkan pendapatan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa banglas. Pengelola juga memperkenalkan jenis-jenis mangrove yang ada di wilayah wisata tersebut yakni disetiap pohon mangrove diberikan nama agar pengunjung yang datang dapat mengetahui jenis mangrove yang ada di ekowisata tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep ekowisata dimana menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tujuan utama dari ekowisata.

Perencanaan dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove ini membutuhkan sebuah konsistensi, dimana konsistensi ini diperlukan untuk menjaga agar ekosistem ini tetap terjaga melalui konservasi dan penanaman bibit mangrove. Semakin banyak hutan mangrove yang ditanamkan maka ekosistem akan semakin baik dan itu akan memberi pengaruh untuk ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi serta mempengaruhi

keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove ini membutuhkan perencanaan ekonomi yakni perencanaan penambahan infrastruktur serta wahana-wahana yang dapat membuat masyarakat nyaman sehingga akan banyak pengunjung yang datang. Dengan banyaknya pengunjung yang datang itu akan mempengaruhi pemasukan pendapatan.

1.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan ekowisata, perlibatan masyarakat merupakan hal yang penting karena masyarakat juga memiliki peran untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang ada di daerahnya. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan dapat dilakukan dengan keterlibatan secara sukarela dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan seperti memberikan masukan berupa ide, tenaga, barang, uang atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove yakni mereka bergotong royong secara sukarela di sekitar ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi serta menanam bibit-bibit Mangrove sebagai tambahan di lokasi lokasi yang perlu diisi. Dan untuk pengembangan ekowisata hutan mangrove ada kelompok sadar wisata, kelompok sadar wisata ini terdiri dari pemuda-pemuda yang berada di desa banglas. mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekowisata hutan mangrove yakni memelihara dan berinovasi dengan memberikan kreatifitas dan ide-ide hal-hal yang dapat membuat ekowisata lebih baik lagi yang mana tujuannya untuk menarik pengujung agar datang serta memberikan kenyamanan seperti menyediakan kursi santai, membantu mewarnai, dan membuat papan nama di setiap pohon. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove

jembatan pelangi ini, sebab konsep ekowisata secara tidak langsung membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar. Dengan adanya ekowisata hutan mangrove ini membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi adanya kearifan lokal yang diterapkan pengelola yakni melindungi ekosistem seperti hewan laut yang hidup disekitar ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi, jadi kita melarang untuk menangkap atau memusnahkan ekosistem tersebut.

Dalam pelaksanaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi yakni berdasarkan aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Dalam aspek lingkungan yaitu: Program penanaman ulang bibit mangrove. Penanaman ini dilakukan disekitar ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi, jenis bibit mangrove yang ditanam yaitu bakau dan api api. Pelaksanaan kegiatan penanaman bibit mangrove ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir serta menjaga dari abrasi air laut. Kegiatan ini merupakan aktivitas konservasi dalam bentuk kegiatan atau aksi penanaman bibit mangrove. Pengelola bekerjasama dengan Pokdarwis dan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan kemudian pengelolaan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam penanaman dan memulihkan kembali mangrove yang kurang baik. Dalam aspek ekonomi yaitu dilakukan pelaksanaan pembangunan jembatan tambahan, pembelian wahana yaitu *speed boat*, bebek apung, dan sampan dayung untuk penunjang pengembangan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi. Dengan adanya penambahan jembatan dan wahana itu akan membuat pengunjung untuk datang serta adanya penambahan pendapatan bagi masyarakat.

1.3 Pengendalian

Pengendalian diartikan sebagai suatu proses yang menentukan dalam

pengelolaan. Pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memeriksa apakah semua kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian memiliki peranan yang penting yaitu untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat tercapai, dan bila tidak dapat dicapai maka akan dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian, tindakan korektif dilakukan.

Pengendalian sangat penting dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja organisasi menjadi tolak ukur sejauh mana kegiatan pemantauan organisasi tersebut. Pengendalian dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting antara hasil yang dicapai dengan kegiatan yang dilakukan.

Kepala Desa dan ketua BUMDES melakukan pengawasan dua kali dalam sebulan tetapi jika memiliki waktu luang tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan monitoring dan untuk BPD mereka melakukan pengawasan satu kali dalam sebulan. Tidak ada jadwal yang ditetapkan. Pihak pengawas biasanya memantau unit-unit baik itu kinerjanya dan memeriksa bidang kebersihan, pengamanan, parkir, penjaga tiket dan fisik seperti jembatan serta apa yang kurang di ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi.

Pengendalian sangat diperlukan mengingat rendahnya kualitas masyarakat yang paham tentang pariwisata. Pengendalian juga perlu direncanakan secara matang dan pengendalian dilakukan secara teratur dan terstruktur.

2. Faktor penghambat pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi

Faktor penghambat merupakan permasalahan atau halangan yang akan di hadapi dalam melakukan pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi, adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan ekowisata hutan mangrove

jembatan pelangi berdasarkan hasil riset dari peneliti diantaranya yaitu :

2.1 Keterbatasan Sumber Dana

Selama ini pengelolaan dan pengembangan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi diperoleh dari dana desa dan swadaya masyarakat. Jumlah anggaran yang di perlukan untuk pengelolaan dan pengembangan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi tersebut belum memadai, dan anggaran yang tersedia belum seimbang dengan pembangunan fasilitas-fasilitas yang harus dibangun oleh pihak pengelola.

Faktor penghambat pengelolaan ekowisata mangrove ini sejalan dengan penelitian (Djafar & Maros, 2019) bahwa terbatasnya sumber dana untuk pembangunan, penataan dan pengelolaan ekowisata. Hal ini didukung juga oleh (Nurhadi et al., 2014) mengungkapkan bahwa dengan dana yang terbatas pengelolaan ekowisata tidak maksimal karena dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam melakukan program-programnya yang telah ditentukan.

2.2 Aksesibilitas serta Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Pada umumnya ekowisata lebih menekankan kepada pelestarian lingkungan, *icon* yang ada di destinasi ekowisata tersebut. Suatu daerah untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi ekowisata perlu adanya unsur-unsur yang mendukung, tidak hanya mengandalkan potensi serta keindahan alam saja. Hal ini secara tidak langsung akan membuat pengunjung berminat untuk datang ke destinasi ekowisata tersebut. Namun ada satu hal yang penting lainnya yang akan membuat pengunjung berminat untuk berkunjung ke destinasi ekowisata yaitu aksesibilitas. Semakin baik dan lancar akses jalan yang di tempuh maka akan berminat pula para wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut. Tentunya akses jalan menjadi suatu pertimbangan

bagi wisatawan sebelum mengunjungi suatu destinasi.

Dalam konteks ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi, hal ini merupakan suatu hal yang menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat berkembangnya ekowisata tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, akses jalan saat akan memasuki ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi tidak baik.

Selain aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hal yang penting untuk menunjang suatu kegiatan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi wisatawan belum dilakukan secara maksimal seperti masih kurangnya kantin, belum adanya mushola serta perlu penambahan antraksi lainnya. Guna menunjang pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi berkembang lebih baik diperlukan penambahan sarana dan prasarana tersebut.

2.3 Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Bertambahnya kasus covid-19 di Indonesia pada 2020 menyebabkan seluruh sektor mengalami kelumpuhan tidak terkecuali sektor pariwisata juga terkena dampak dari bencana non alam ini. Sehingga keadaan tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan kebijakan terkait dengan keramaian dan kerumunan yang mana hal ini tentunya berhubungan dengan sektor kepariwisataan di Indonesia. Adapun kebijakan yang di lakukan Pemerintah Indonesia yaitu melakukan penutupan atau *lock down* sementara hampir kepada seluruh destinasi wisata di Indonesia.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang sudah penulis lakukan memberikan kesimpulan dan saran antara lain:

1. Pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi yang

dilakukan oleh BUMDES Banglas Bestari menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sudah menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan namun belum diterapkan secara maksimal. Adanya ekowisata hutan mangrove ini dapat memberikan pengaruh bagi aspek lingkungan, ekonomi dan aspek sosial. Pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi menjadi destinasi wisata memberikan dampak baik bagi lingkungan tentunya seperti melestarikan serta melakukan penanaman bibit mangrove dan membuka lapangan pekerjaan serta menambah pendapatan dengan turut berpartisipasi di pengelolaan ekowisata ini. Namun masih terdapat beberapa hal yang masih belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari belum ada dokumen perencanaan, kurangnya koordinasi serta pengawasan terhadap pengelolaan ekowisata masih kurang teratur dan terstruktur yang mana dapat dilihat dari tidak adanya jadwal yang tetap atau rutin untuk melakukan monitoring ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi. Pengetahuan tentang pariwisata yang masih kurang serta pemeliharaan yang dilakukan pengelola belum maksimal.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi yaitu keterbatasan sumber dana yang membuat sulitnya perawatan dan pemeliharaan beberapa fasilitas yang ada, serta pembangunan yang telah di rencanakan tertunda karena anggaran yang ada di prioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kemudian akses jalan serta sarana dan prasarana yang belum memadai yang mana hal tersebut menjadi faktor penting disektor kunjungan. Kemudian adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

sehingga ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi diharus tutup sementara.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran terkait pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi sebagai berikut :

1. Agar pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi lebih baik dan optimal, dapat melakukan beberapa hal berikut ini: diadakannya pelatihan oleh pemerintah terkait bagaimana cara mengelola ekowisata agar mampu bertahan, bersaing dan berdayaguna. Untuk menunjang pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi berkembang lebih baik lagi diperlukan penambahan sarana dan prasarana seperti mushola, penambahan kantin yang menyajikan makanan khas dan juga memanfaatkan buah mangrove sebagai oleh oleh yang diolah menjadi sebuah produk seperti sirup, selai dan lainnya, yang mana hal tersebut dapat menambah minat pengunjung. Kemudian penambahan wahana antraksi lainnya serta perbaikan jalan agar pengunjung lebih nyaman, yang mana aksesibilitas menjadi faktor penting disektor kunjungan.
2. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor penghambat dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi yaitu sebagai berikut: pihak BUMDES harus memanfaatkan dan memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam mengelola ekowisata hutan mangrove jembatan pelangi menjadi destinasi wisata yang menarik yang dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebaiknya segera

merealisasikan penanganan perbaikan akses jalan menuju Ekowisata Hutan Mangrove Jembatan Pelangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, F. (2020). Pengelolaan Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara Sejahtera di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Journal of Government Science (GOVSCI)*, 1(1), 31–41.
- Bleszeinsky, G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan di kawasan Pantai Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(1), 1–13.
- Djafar, M., & Maros, U. M. (2019). Strategi Pengembangan Ekowisata Karst di Dusun Rammang-Rammang Maros, Sulawesi Selatan The Strategies Of Karst Ecotourism Development in Rammang-Rammang Village Maros, South Of Sulawesi. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 2(1), 1–9.
- Hariato, B., Syahbuddin, & Reni, W. O. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tepule Desa Tudungano Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara. *Selami Ips*, 13(1), 24–32.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, M. S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. PT. Bumi Aksara.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.
- Kiswanto, A., & Susanto, D. R. (2020). Strategi Pengelolaan Pantai Baron Sebagai Pariwisata Berkelanjutan Dalam Menyongsong Abad Samudra Hindia. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3), 249–257.
- Latif, B. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Kota Tanjungpinang Mengunkan Konsep Lingkungan Bakau Kite. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 1(2), 65–78.
- Lexy J, M. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muamar, A., Faozi, M. M., & Fitriati, A. (2018). Pengelolaan Kawasan Wisata Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 117–133.
- Nugroho, I. (2015). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar.
- Nurhadi, F. C. D., Mardiyono, & Rengu, S. P. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokero) Febrianti. *Administrasi Publik*, 2(2), 325–331.
- Pariyanti, E., & Susiani, F. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Fidusia*, 2(2), 1–12.
- Pasaribu, F. R. (2019). Manajemen Istano Basa Pagaruyung. *Jurnal Pariwisata*, 6(1), 71–79.
- Riana, A., Pianti, D. O., Ramadhila, R., Pranata, Y., & Nata, P. R. (2020). Potensi Hutan Mangrove sebagai Ekowisata Bagi Masyarakat Pesisir Bengkulu. *ISEJ: Indonesian Science Education Journal*, 1(3), 210–215.
- Siswanto, H. (2005). *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi ke-3)*. Penerbit Alfabeta.

Wahyuni, P. ika, Ardhana, I., & Sunarta, I. nyoman. (2012). Evaluasi Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Tahura Ngurah Rai. *Ecotrophic: Journal of Environmental Science*, 4(1), 49–56.

Dokumen

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan (Pasal 6 Mengenai Pembangunan Kepariwisataaan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (pasal 1 ayat 7 mengenai BUMDes)

Peraturan Kepala Desa Banglas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Wisata Desa Hutan Mangrove

Peraturan Desa Banglas Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) BanglasBestari Desa Banglas

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa BanglasBestari Desa Banglas Kecamatan TebingTinggi Kabupaten Kepulauan Meranti